

Bimtek Pengawas Sekolah



FUNGSI dan PERAN Pengawas Sekolah

DALAM NKRI

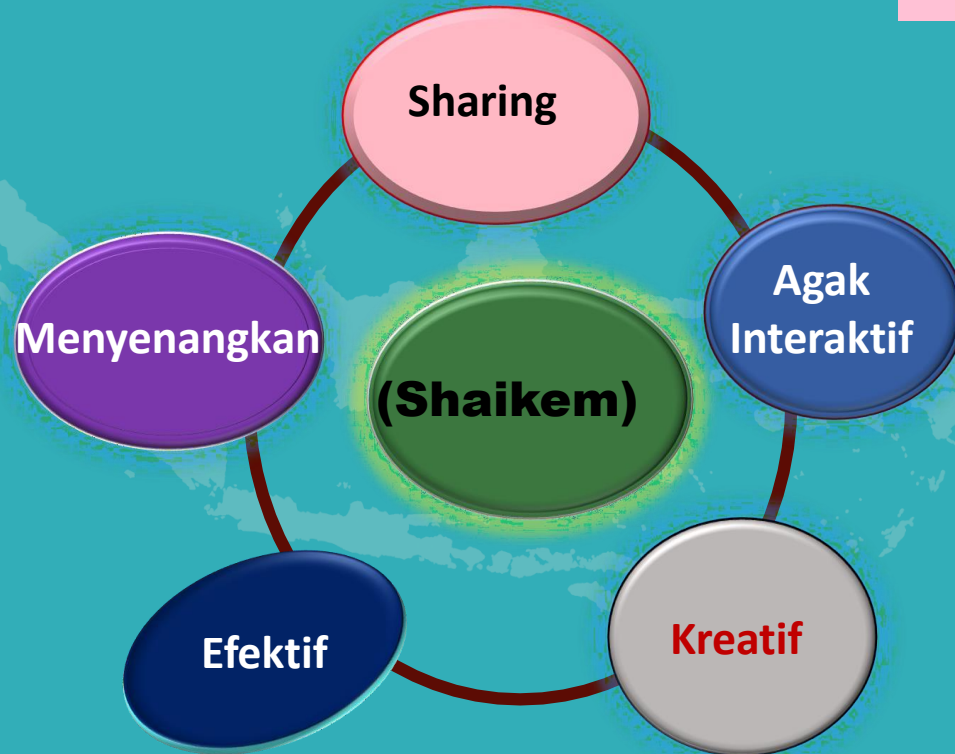
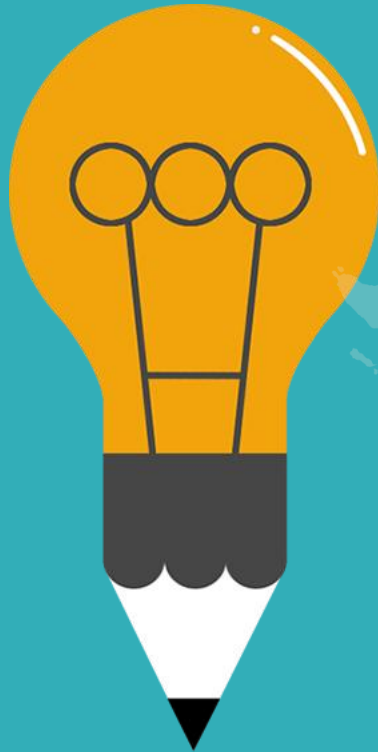
oleh: Sri Widodo
Widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Barat

KOMPETENSI YANG DIBANGUN

- 01** Menunjukkan sikap perilaku Bela Negara
- 02** Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS (Pengawas Sekolah) dalam kerangka NKRI
- 03** Mengaktualisasikan nilai-nilai Dasar PNS (Pengawas Sekolah) dalam pelaksanaan tugas jabatannya
- 04** Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas Pengawas Sekolah



METODE (Shaikem)







Masyarakat
adalah Orang2 yang hidup ber
sama dan menghasilkan kebud
ayaan.

Ciri2nya: Hidup berkelompok ,
Mengalami Perubahan, melahir
kan kebudayaan, berinteraksi,
terdapat kepemimpinan,
Adanya stratifikasi sosial.
(Prof Dr. Selo Sumardjan)



Bangsa

Adalah sekelompok besar
manusia yang mempunyai
keinginan keras bersatu,
mempunyai persamaan
watak dan hidup bersama
dalam satu wilayah yang n
yata
(Bung Karno)



NEGARA

adalah suatu daerah territorial
yang rakyatnya diperintah oleh
sejumlah pejabat.dan menuntut
Warga Negaranya taat kepada
peraturan perundangan2nya,
melalui penguasaan / control
monopolistis kekuatan politis
dari kekuasaan yang sah.

Unsur negara : Penduduk, wily
ah,Pemerintah dan Pengakuan .
(Prof. Dr Miriam Budiardjo.)

BERNEGARA

BERBANGSA

BERMASYARAKAT

Darimana didapatkan nilai-nilai NKRI ?

Sejarah Terbentuknya
NKRI

Ada
Data dan Fakta

Terdapat
Nilai-nilai



Sesudahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembertaraan ini.
Kerapatan laloe mengambil kepoatoesan :
Pertama : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.
Kedoea : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.
Ketiga : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOEN - DJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.
Setelah mendengar poatoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakdnan azas ini wadajib dipakai oleh segala perkoempoelan kebang-
I -30 04 s/d 02.05.1926 M. Tabrani
II.27.10 s/d 28.10.1928 SOEGONDO .



**BELANDA 8.03.42 NYERAH di X.JATI
JEPANG 15.08.45 NYERAH ,BOM 6,7
BPUPKI 01.03.45 S/D 18.07.45
PPKI 07.08.45 – 29.08.45**

Sejarah Perjuangan Membentuk NKRI Yang Berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945

Konsensus Bersama Keinginan Keras, **KEHENDAK Untuk Bersatu hidup Bersama Dalam satu wilayah, Saling Menghargai dan menghormati perbedaan**

BERNEGARA
Proklamasi,
17 AGUSTUS 1945, NKRI.
18-08 UUDNRI thn 1945
oleh PPKI.

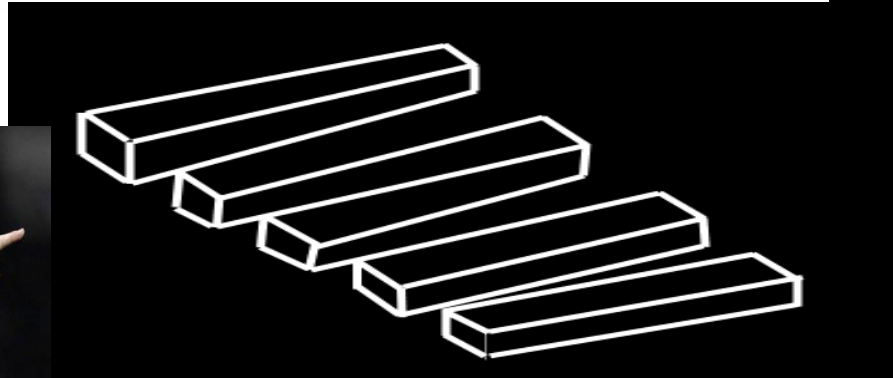
BERBANGSA
I.30-04-0205.1926
M.Tabrani – Bhs Melayu → Bhs Indonesia
II. 28 OKTOBER 1928 Sumpah Pemuda

BERMASYARAKAT

Sebelum 28-10-28

Berapa JUMLAH BALOK?

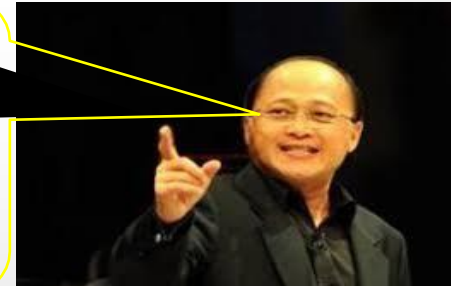
**JELAS ADA
5 BALOK**



**menurut saya
4 balok, BRO...**



**Super sekali , anda berdua benar,
karena melihat dari sisi masing2.
Perdebatan tidak akan pernah selesai.
Lihatlah persoalan dari semua sisi
(Hol.Int.Kompr) Adakan Musyawarah Mufakat**





FAKTA-FAKTA

- Wilayah Nasional, Kedaulatan Negara
- Kesatuan Wilayah NKRI
- Hubungan Antar bangsa, Konvensi Internasional
- Ling Stra (Global, Regional & Nasional)
- PEMBANGUNAN NASIONAL

SOLUSI





“Batu-Bangun”



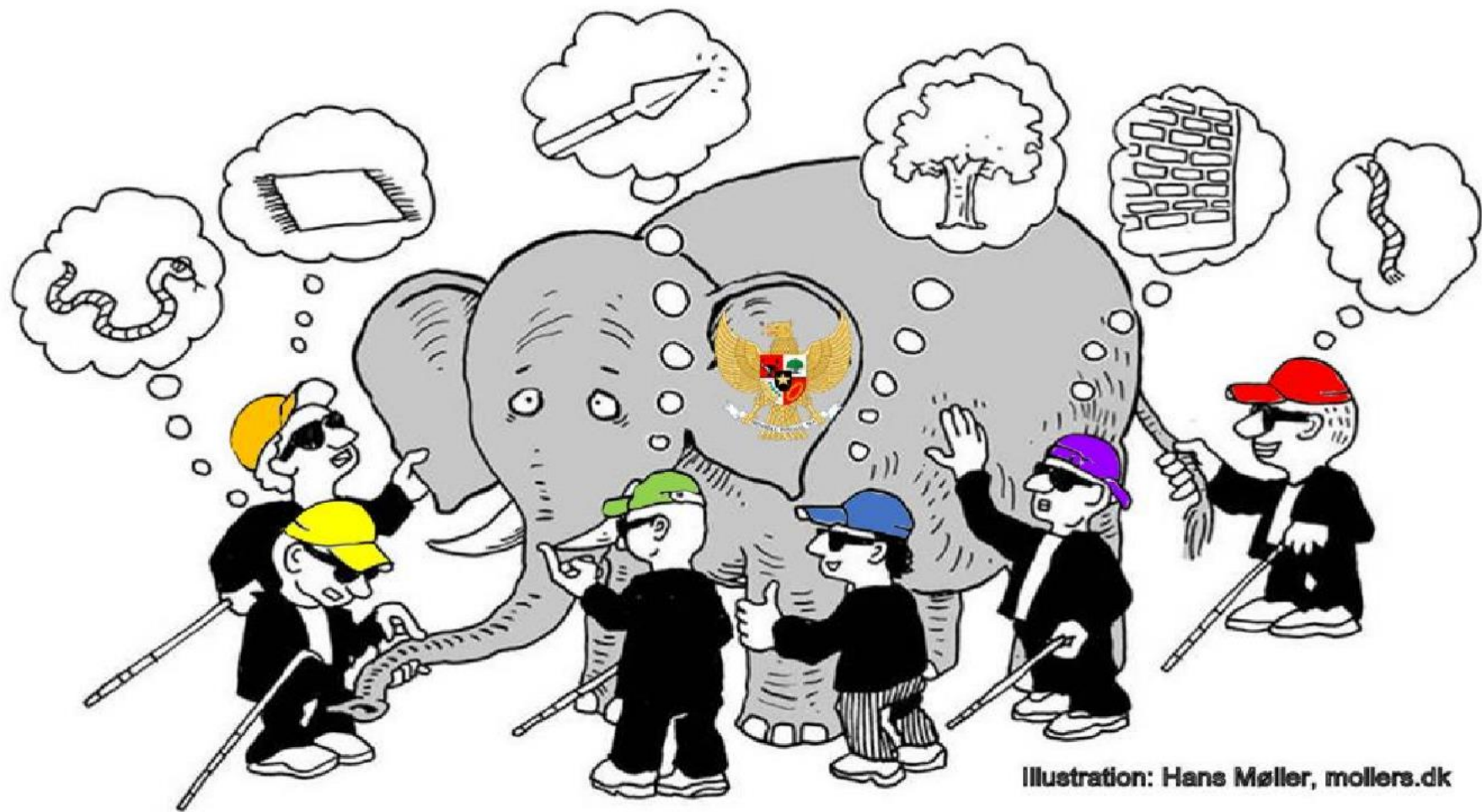


Illustration: Hans Møller, mollers.dk

Wawasan Nusantara (WasantarA)

Cara
pandang
bangsa

INDONESIA
tentang

Diri &
lingkungan
keberadaannya

dengan
memanfaatkan

kondisi
&
konstelasi

GEOGRAFI

dengan
menciptakan

- Tanggung jawab
- Motivasi &
- Rangsangan

bagi

seluruh
bangsa

INDONESIA

untuk mencapai

TUJUAN NASIONAL



Mengutamakan . . .



Persatuan & Kesatuan

BANGSA

Bangga identitas & Jaga Integritas
bangsa Kehidupan Multikultural & Plural

NILAI-NILAI



Kesatuan

WILAYAH

Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa
& Bernegara Rela Berkorban



DIMENSI PEMIKIRAN

Realita

KEWILAYAHAN

Fenomena

PEMANFAATAN

Holistik, Komprehensif,
Integral, Sistemik
Sinergik, Obyektif &
Positif

Padukan Retorika → Logika → Aktualita



LUAR

**GLOBAL &
REGIONAL**

Jamin kepentingan
Nasional & Jaga
Ketertiban dunia



ARAH

DALAM

NASIONAL

Kondisi & Konstelasi
Sarwa Nusantara
Diapit, Terhubung &
Menyatu



CARA PANDANG

PEMBANGUNAN NASIONAL



Kepulauan
Nusantara
sebagai SATU:



INOVASI PELAYANAN PUBLIK – GLOBAL TREND



UNITED NATIONS



2017 United Nations Public Service Forum

22-23 June 2017
The Hague, Netherlands

The Future is Now:
Accelerating Public Service Innovation for Agenda 2030



مركز محمد بن راشد
للابتكار الحكومي
MOHAMMED BIN RASHID CENTRE
FOR GOVERNMENT INNOVATION



TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI

1 Ease of Doing Business – World Bank

Negara	Peringkat 2018
 Singapura	2
 Malaysia	24
 Thailand	26
 Brunei Darussalam	56
 Vietnam	68
 Indonesia	72
 Filipina	113
 Kamboja	135
 Laos	141
 Myanmar	171
 Timor Leste	178

2 Global Competitiveness Index – World Economic Forum

Countries	2016-17	2017-18
Switzerland	1	1
Singapore	2	3
United States	3	2
Malaysia	25	23
China	28	27
Indonesia	41	36
Russia	43	38
South Africa	47	61
India	39	40
Brazil	81	80

3 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	2015
76	Thailand	38	
76	Tunisia	38	
76	Zambia	38	
83	Benin	37	
83	China	37	
83	Colombia	37	
83	Liberia	37	
83	Sri Lanka	37	
88	Albania	36	
88	Algeria	36	
88	Egypt	36	
88	Indonesia	36	
88	Morocco	36	

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	2016
79	China	40	
79	India	40	
83	Albania	39	
83	Bosnia and Herzegovina	39	
83	Jamaica	39	
83	Lesotho	39	
87	Mongolia	38	
87	Panama	38	
87	Zambia	38	
90	Colombia	37	
90	Indonesia	37	
90	Liberia	37	

8
8

9
0

Daya saing Indonesia 2019 (50/141)

Indeks Kreativitas 115/139 (2019)

Indeks Inovasi 85/131 (2020)

PISA (Reading 74/79, mat 73/79, Sains 71/79) di bawah rata rata negara OECD, dua terbawah di ASEAN

9 CIRI NEGATIF MANUSIA INDONESIA

JIKA 9 DARI 15 CIRI DI BAWAH INI MELEKAT PADA ANDA.
MAKA ANDA SAH SEBAGAI MANUSIA INDONESIA!



RAMAH



MALAS



TIDAK DISIPLIN



KORUPSI



EMOSIONAL



INDIVIDUALIS



SUKA MENIRU



RENDAH DIRI



BOROS



PERCAYA TAKHAYUL



BODOH



PENGOCEH



MUNAFIK



SOMBONG



KREATIF

Sebagai bangsa, kita sebenarnya sudah tahu kekurangan dan kelemahan kita.
Sebagai negara kita sudah pernah mengalami masa surut dan susut.
Sudah banyak pidato untuk mengingatkan bangsa di negara ini.
Sudah banyak penelitian untuk membangkitkan negara bernama Indonesia.
Mungkin sudah saatnya menggunakan cara lain!

Saat pidato diabaikan, saat penelitian dipinggirkan,
saatnya komik ambil tindakan!

-Ali Akbar-
(Peneliti Sosial Budaya dan Dosen Arkeologi UI)

TAPLAI KBS LEMHANNAS RI

Cetakan Pertama
Kecamatan Rong 15 Guluh Mada Jakarta Barat 11110
Telp. 021 5202102 Email: cendekiasat@gmail.com
Facebook: @CENDAKIA.MIT MEDIA

ISBN 978-602-98960-6-0



9 786029 896060



PERSAINGAN GLOBAL

”

"Bukan negara kuat yang mengalahkan yang lemah, bukan negara besar yang mengalahkan yang kecil, namun **negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat**"
(Jokowi, 4-5-2017)

“

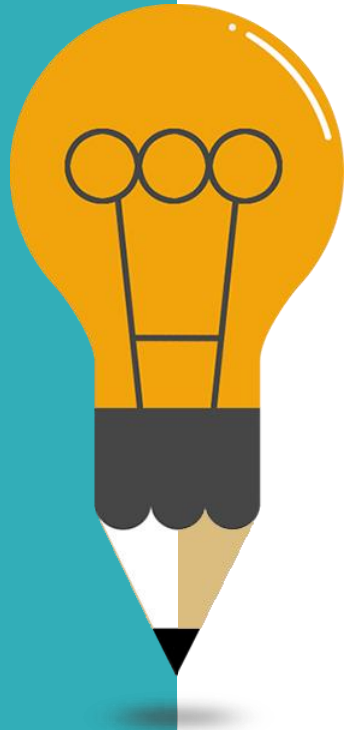
Persaingan yang terjadi, antara lain:

- **Memperebutkan investasi**
- **Memperebutkan pasar**
- **Memperebutkan wisatawan**



4 Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045

Visi Indonesia 2045 – Sumber Daya Manusia



INDONESIA
2045

Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur

Berdaulat,
maju, adil,
dan makmur

Pilar Perkembangan



Pengembangan
SDM dan sains
& penguasaan
teknologi



Pembangunan
ekonomi
berkelanjutan



Pembangunan
yang adil



Memperkuat
ketahanan
nasional dan
pemerintahan

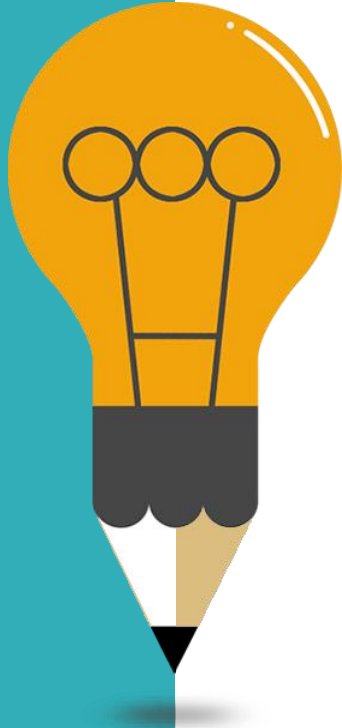
Input Terkait

- Tenaga kerja Indonesia yang **berpendidikan** (min. pendidikan formal 12 tahun)
- Masyarakat yang memiliki nilai **luhur dan nasionalis** serta **etos kerja yang baik**
- Tenaga kerja yang **lebih sehat, fleksibel, dan adaptif**
- **Pengajar** dan pengajaran yang **berkualitas tinggi**
- Peningkatan **kontribusi sains dan teknologi** untuk pembangunan
- Pendidikan **vokasi, kewirausahaan, dan karakter** yang lebih baik
- **Kolaborasi yang lebih baik** antara **pemangku kepentingan dan masyarakat**

Untuk mendukung hal tersebut:

- Peningkatan kemudahan berbisnis dan FDI
- Industri dan pengolahan SDA yang bernilai tambah
- Ekonomi kreatif yang lebih kuat dan pariwisata yang bertumbuh
- Kelautan, perikanan, dan pertanian yang semakin besar; dengan peningkatan infrastruktur dan tenaga kerja
- Meningkatnya upaya berkelanjutan (pemakaian energi terbarukan, pengelolaan air, dan kualitas lingkungan) lebih baik
- Demokrasi, birokrasi, pemerintahan, penegakan hukum, pencegahan korupsi, ketahanan, dan keamanan nasional
- Distribusi kesejahteraan dan pembangunan yang merata

Tantangan Bagi SDM Pengelola Pelayanan Publik Saat Ini



01

SDM dengan talent yang berkualitas

02

Tim yang Handal

03

Tantangan SDM yang cenderung lebih loyal pada profesi

04

SDM yang penuh inisiatif dan mampu mencari solusi untuk setiap tantangan yang muncul.

MENGAPA INOVASI?

Inovasi Bagi Dunia Bisnis: Nafas untuk keberlangsungan usaha.

Pilihannya: **Berinovasi atau mati.**



REVOLUSI INDUSTRI 4.0

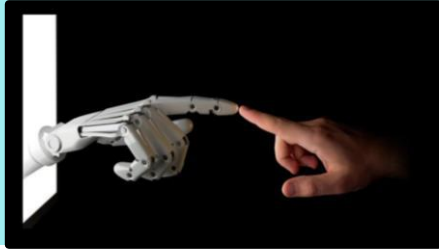


Inovasi Bagi Sektor Publik: Nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Pilihannya: **Berinovasi atau kehilangan kepercayaan publik dan daya saing.**

REVOLUSI INDUSTRI 4.0: TECHNOLOGY DISRUPTION

→ *NEW CULTURE*



**Human Machine
communication**



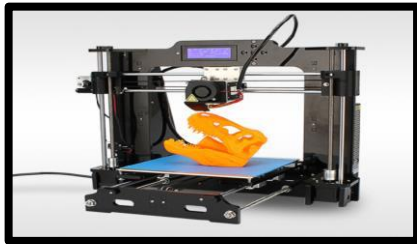
**Connection:
global village**



Smart Robot



Internet of Things



3D Printer



Driverless car



Big Data



Online/virtual education



“ PENDIDIKAN “

Transfer & Transform



Pramuka



Bela Negara

Mapala



Bintal Juang Remaja Bahari

PMR (Palang Merah Remaja)



Kaderisasi PimNas

Kehidupan

Bermasyarakat, Berbangsa & Bernegara

***“Pendidikan adalah tempat
persemaian benih-benih
kebudayaan.”***



GAMBARAN UMUM JAWA BARAT

Penduduk
48.683.861 Jiwa

Laki-Laki: **24.65 juta jiwa**

Perempuan : **24.03 juta jiwa**

Balita (0-5)

8,92 %

Usia Muda (6-15)

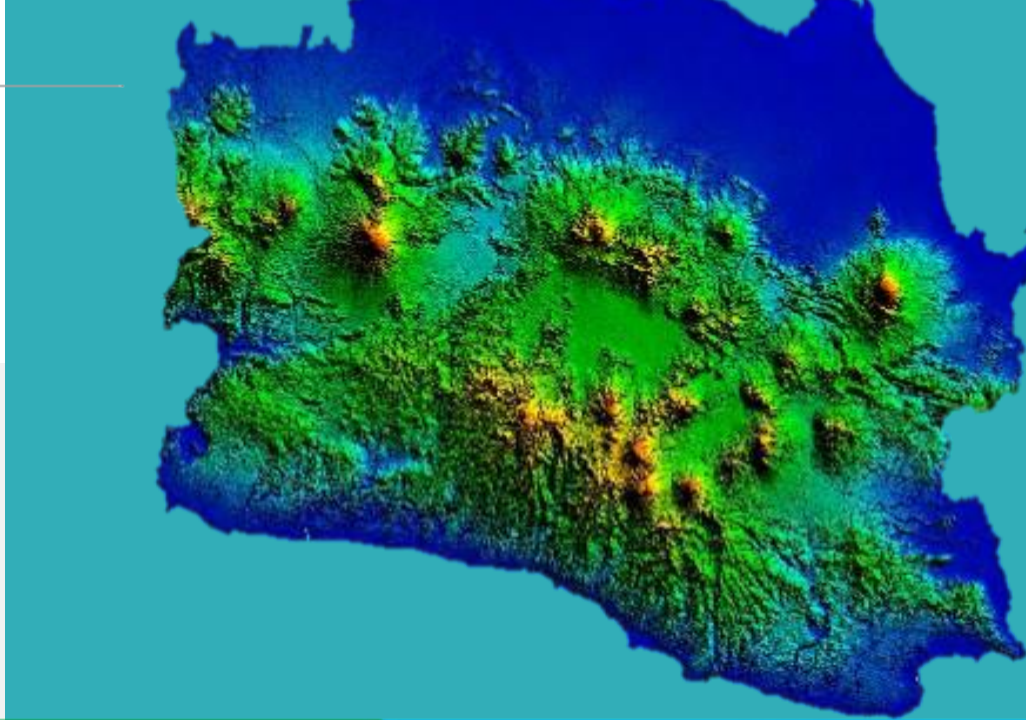
17,37 %

Usia Produktif (15-60)

64,70 %

Usia Tua (>60)

8,98 %



Luas Wilayah
3.709.528,44 Ha

18 Kabupaten

9 Kota

627 Kecamatan

645 Kelurahan

5.312 Desa

VISI

TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI

MISI 1



› Membentuk manusia pancasila yang **bertaqwa** melalui peningkatan peran **masjid dan tempat ibadah** sebagai pusat peradaban

MISI 2



› Melahirkan **manusia** yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan **pelayanan publik** yang inovatif

MISI 3



› Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan **pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang** yang berkelanjutan melalui peningkatan **konektivitas wilayah dan penataan daerah**

MISI 4



› Meningkatkan produktivitas dan daya saing **ekonomi umat** yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi **digital** dan **kolaborasi** dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan

MISI 5



› Mewujudkan **tata kelola pemerintahan** yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

PRIORITAS PEMBANGUNAN JABAR JUARA



PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2018-2023



JABAR JUARA

37 Juara, dua, diantara terkait Pengawas Sekolah:



Akses Pendidikan Untuk Semua



Desentralisasi Layanan Kesehatan



Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi



Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata



Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara



Infrastruktur Konektivitas Wilayah



Gerakan Membangun Desa



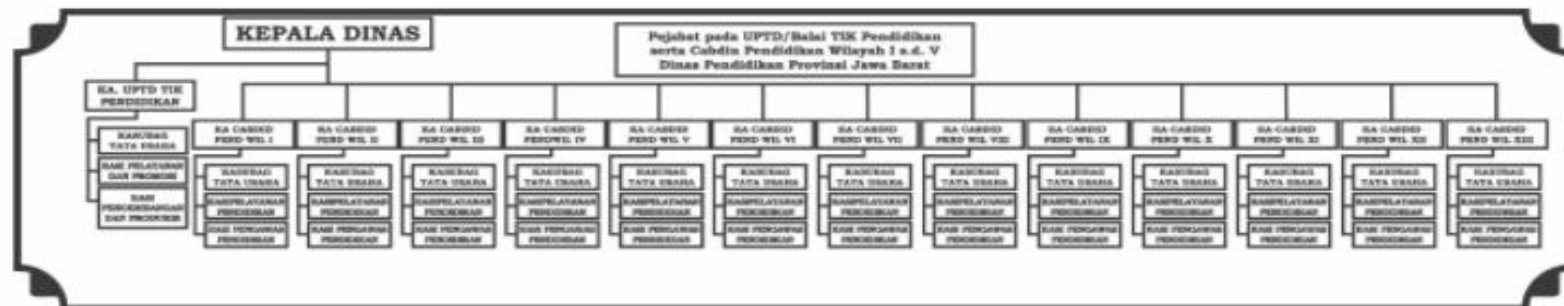
Subsidi Gratis Golekmah



Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

DAFTAR KAB./KOTA PADA SETIAP CABANG DINAS PENDIDIKAN
WIL.X Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan
WIL.XI Kab. Garut
WIL.XII Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya,
WIL.XIII Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran





**Ing ngarso sung tulodo,
Ing madya mangun karso,
Tut wuri handayani**



Kedudukan Pengawas Sekolah

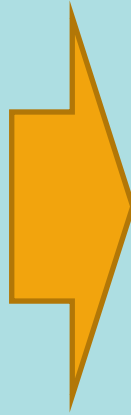
(1) **Pengawas Sekolah** berkedudukan sebagai **pelaksana teknis fungsional** di bidang **pengawasan akademik** dan **manajerial** pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

(2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS



Peran Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah memiliki peran **menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional** melalui **penjaminan mutu pembelajaran** dalam bidang pengawasan akademik dan **penjaminan efektifitas pengelolaan pendidikan** dalam bidang pengawasan manajerial



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi **peserta didik** agar menjadi manusia yang **beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri**, dan menjadi **warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.**



Pasal 55 PP 19 Tahun 2005, menyatakan “**Pengawasan satuan pendidikan terdiri atas pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.** Dan pasal 39 (ayat 1) menyebutkan “Dimana pengawasan terhadap pendidikan formal dilakukan oleh **pengawas satuan pendidikan**”



Ing ngarso sung tulodo,
Ing madya mangun karso,
Tut wuri handayani

PP 13 Tahun 2015 Pasal 1 (ayat 10)

“ Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. ”



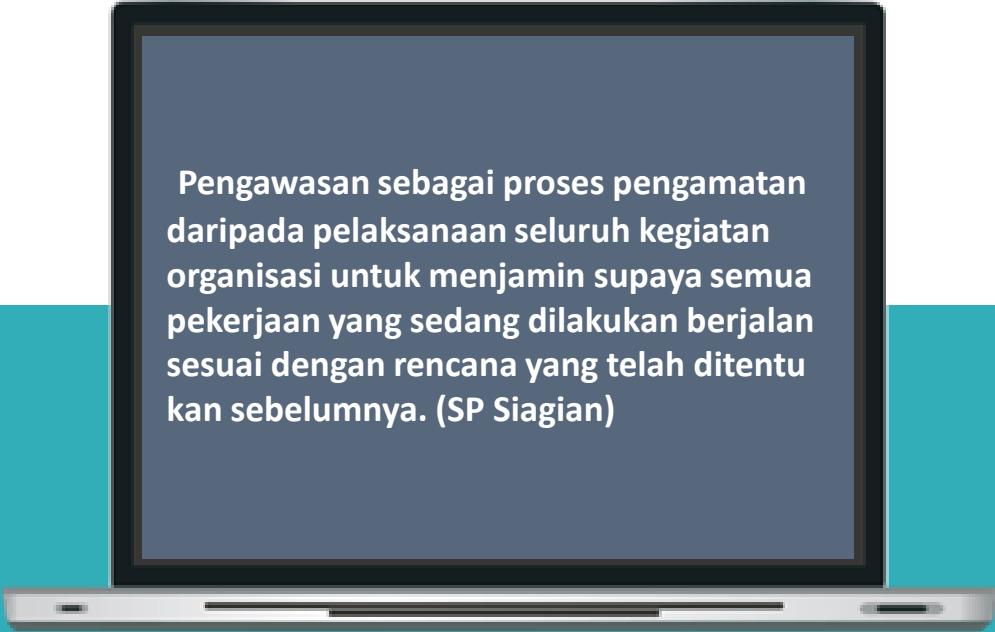
Your Text Here

Contents

Pengawasan

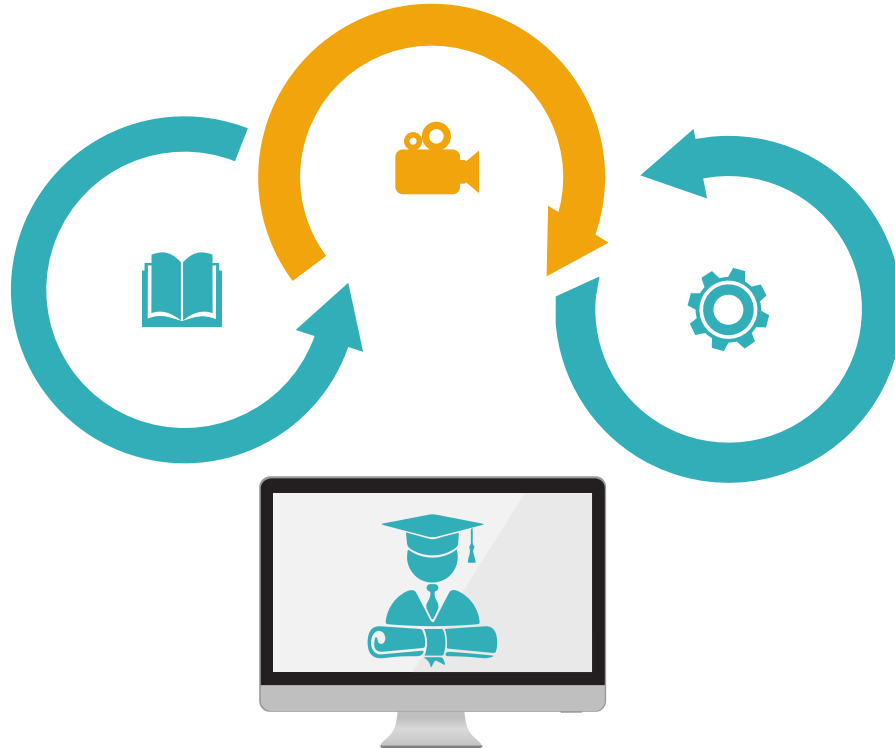
Pengawasan adalah suatu proses pemantauan, pengukuran, dan juga melakukan perbaikan atas pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (Maman Ukas):

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin tugas, tujuan, dan sasaran organisasi telah terselenggara dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (LAN-RI)



Pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (SP Siagian)

Tugas Pokok Pengawas Sekolah



Dalam Pengawasan Akademik:



Pembinaan

bantuan profesional bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru di sek. binaan yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian



Penilaian

melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan/atau oleh guru yang ditunjuk



Pemantauan

kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan rencana, program, dan/atau Standar Nasional Pendidikan



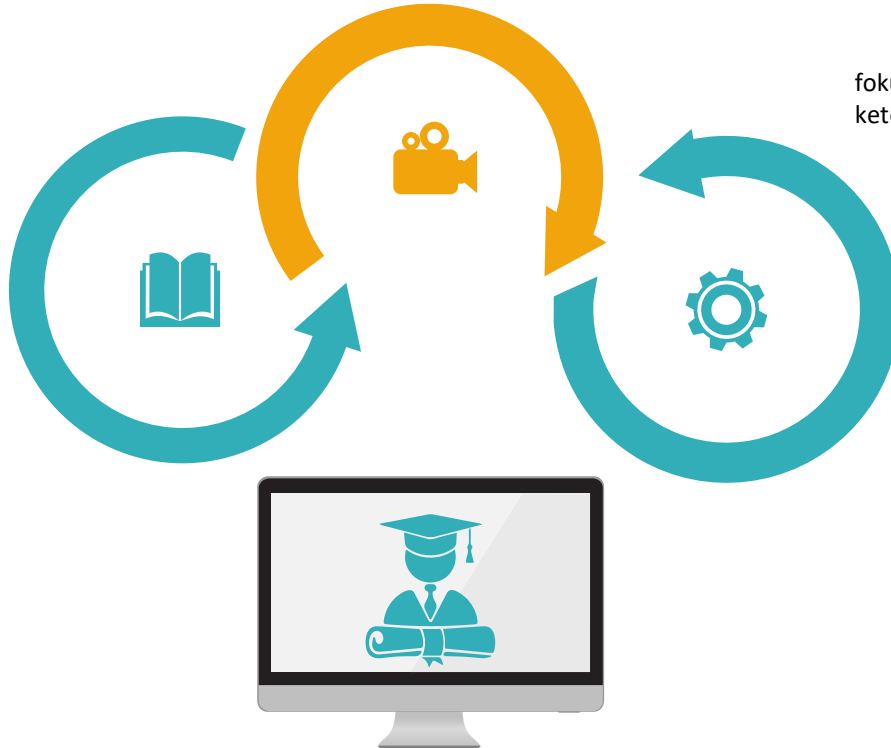
Pembimbingan dan pelatihan

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan memenuhi tuntutan pengembangan karier

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Dalam Pengawasan Manajerial:

fokus manajemen kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus



Pembinaan

bantuan profesional kepada kepala sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan/sekolah yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja.



Penilaian

penilaian kinerja bagi kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan



Pemantauan

kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk memantau keterlaksanaan penyelenggaraan pendidikan apakah telah sesuai dengan rencana, program, dan/atau Standar Nasional Pendidikan



Pembimbingan dan pelatihan

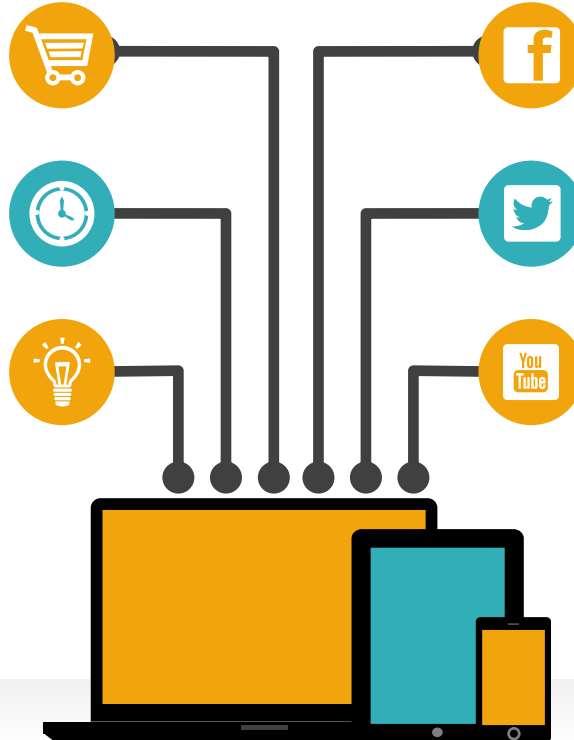
bertujuan untuk memenuhi tuntutan pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam mengelola satuan pendidikan sehingga delapan standar nasional pendidikan dapat dilaksanakan dan dipenuhi

Fungsi Melekat pada Diri Pengawas Sekolah

Fungsi Inspeksi yang melekat pada diri seorang pengawas satuan pendidikan (sekolah) dimaksudkan, agar pengawas sekolah memiliki kemampuan untuk memahami kondisi sekolah binaanya secara

Fungsi Pelatihan, Seorang pengawas yang profesional harus senantiasa siap untuk dijadikan narasumber bahkan sekaligus referensi hidup bagi warga sekolah.

Fungsi penilaian, Seorang pengawas sekolah harus melakukan pengukuran terhadap hasil kerjanya



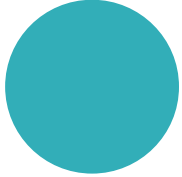
Fungsi penelitian; upaya yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang telah dideteksi dan dapat menyusun program untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada sekolah binaanya.

Fungsi Bimbingan : upaya pengawas sekolah dalam mendorong guru agar mereka mau melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Fungsi Pembinaan: upaya pengawas sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap guru/kepala sekolah binaan yang menyimpang dari ketentuan.

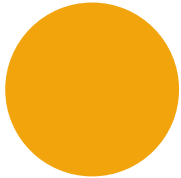
peran pengawas sekolah

Pengawas sekolah memiliki peran **menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional** melalui **penjaminan mutu pembelajaran** dalam bidang pengawasan akademik dan **penjaminan efektifitas pengelolaan pendidikan** dalam bidang pengawasan manajerial



PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Pengawas Sekolah menjalankan tugas pokok mengemban kebijakan-kebijakan yang sesuai kewenangannya



PELAYAN PUBLIK

Pengawas sekolah menjalankan sebagian tugas pemerintahan yang bergubungan dengan pelayanan publik di bidang pendidikan.



Pelayan publik wajib berpedoman pada nilai-nilai dasar
Etika Publik

Nilai-Nilai Dasar Etika Publik

1. TEGUH

Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.



3. Bersikap PROFESIONA

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak



5. TIDAK DISKRIMINATIF

Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.



2. SETIA

Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

4. Bersikap ADIL

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan.

Nilai-Nilai Dasar Etika Publik

6. KOMITMEN

memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.



8. KOMPETEN

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah



7. AKUNTABEL

Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.



9. LAYANAN PRIMA

layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.



10. BERMUTU

Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.



Nilai-Nilai Dasar Etika Publik

11. MANAJERIAL

Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.



13. HASIL GUNA

Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.



12. KERJASAMA

. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.



14. SETARA

Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

15. EFEKTIF

Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.



Etika Publik

Tujuannya: Tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, artinya: kekuasaan, rumusan kebijakan yang dibuat dan cara melaksanakan pelayanan publik yang dilakukannya dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya.

Good Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum.

Requist Etika publik juga mengharuskan agar setiap kekuasaan dipergunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing.



Kode Etika Pengawas Sekolah

Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dari dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah

01

Dalam melaksanakan tugas senantiasa berlandaskan iman dan taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

02

Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah

03

Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah

04

Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dari dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah

05

Menjaga citra dan nama baik selaku pembina

06

Disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah

Kode Etika Pengawas Sekolah

07

Mampu menampilkan keberadaanya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani

08

Sigap dan terampil untuk menang gapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya

09

Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat bina an maupun terhadap sesama pengawas sekolah



Implikasi Kode Etik dalam Pelayanan Publik

- Kode Etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit.
- Pelaksanaannya dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri.



Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik.

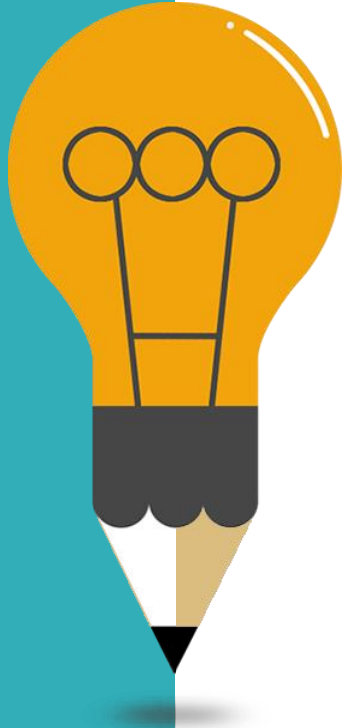
***Ayoo bertindak.... Mari
iii bergerak***

TUGAS INDIVIDU

Silakan identifikasi Nilai-nilai Etika Publik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tugas di tempat kerja

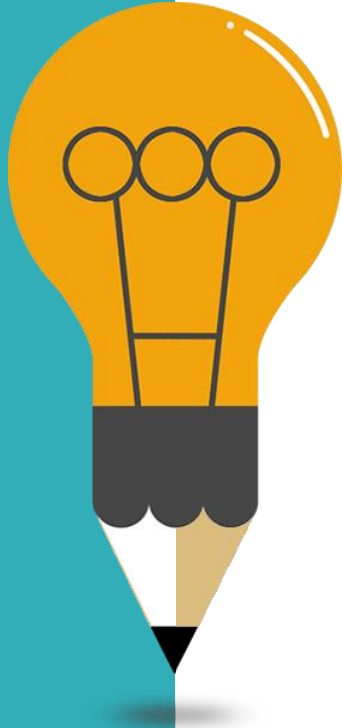
No.	Kegiatan Pelaksanaan Tugas di Tempat Kerja	Nilai - Nilai Etika Publik (penerapan dalam tugas)
1.		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Rincian Kegiatan Pengawas Madya (Permen PAN-RB no.21/2010 pasal 14)



1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan **pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah**;
3. **memantau pelaksanaan standar** isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
4. **melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah**;
5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. menyusun program **pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah** di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah;
8. melaksanakan **pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah** dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan
10. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

Rincian Kegiatan Pengawas Utama



1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;
3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
9. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
10. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
11. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
12. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

Contoh:

Isu/Temuan Masalah Pengawasan

Akademik dan Manajerial

Hasil PKKS rendah
rendah



Nilai Akreditasi Sekolah
rendah



Kemampuan IT Guru
rendah



Jumlah guru tidak
proporsional



Metodologi Pembelajaran
monoton



PPDB tidak adil



Motivasi berprestasi
guru sangat rendah



Penyimpangan penggunaan
dana BOS/BPMU



Hogue (1994) : tiga tingkat kolaborasi terkelola
koordinasi/kemitraan, koalisi, dan kolaborasi
masing-masing jenis kolaborasi ini membutuhkan:


1. Pendirian Lembaga Tata Kelola dengan Kepemimpinan yang Diakui.
2. Pengembangan Strategi dan Rencana Bersama.
3. Identifikasi Peran dan Tanggung Jawab.
4. Perjanjian Formal.
5. Pengambilan Keputusan Inklusif.
6. Komunikasi yang Efektif
7. Pemantauan dan pelaporan yang rutin



Tingkat Kolaborasi	Maksud	Struktur	Proses
Jejaring :	<ul style="list-style-type: none"> - Dialog & pemahaman bersama - <i>Clearinghouse</i> untuk dukungan basis informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Non- hierarkis - Tautan longgar / fleksibel. - Peran didefinisikan dengan longgar - Komunikasi adalah penghubung utama di antara anggota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan kunci rendah. - Pengambilan keputusan minimal. - Konflik kecil dan - Komunikasi informal
Kooperasi atau Aliansi	Menyesuaikan kebutuhan dan koordinasi untuk membatasi duplikasi layanan untuk memastikan tugas selesai dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpusat pada orang sebagai penghubung komunikasi. - Tautan semi formal. - Peran didefinisikan. - Tautan bersifat memberi nasihat. - Sedikit atau tidak ada sumber keuangan baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin fasilitatif. - Pengambilan keputusan yang rumit. - Beberapa konflik. - Komunikasi formal dengan terpusat pada kelompok



Koordinasi atau Kemitraan	<ul style="list-style-type: none">- Berbagi sumber daya untuk mengatasi masalah umum.- Menggabungkan basis sumber daya untuk membuat sesuatu yg baru	<ul style="list-style-type: none">- Terpusat pada orang yang terdiri dari pembuat keputusan.- Peran2 ditentukan.- Tautan2 diformalkan.- Kelompok mengungkit/ mengumpulkan uang/ sumberdaya	<ul style="list-style-type: none">- Kepemimpinan bersifat otonom tetapi fokus pada isu.- Pengambilan keputusan di pusat dan kelompok di pusat dan di subkelompok.- Komunikasi sering dan jelas
Koalisi	<ul style="list-style-type: none">- Membagikan ide-ide dan bermaksud untuk menarik sumber daya dari sistem yang ada.- Mengembangkan komitmen minimal 3 thn	<ul style="list-style-type: none">- Semua anggotaterlibat dlm pengambilan keputusan- Peran dan waktu ditentukan- Tautan secara formal dengan perjanjian tertulis.- Grup mengembangkan sumber daya baru dan anggaran bersama	<ul style="list-style-type: none">- Kepemimpinan bersama.- Pengambilan keputusan formal dengan semua anggota.- Komunikasi adalah hal biasa & diprioritaskan
Kolaborasi	Menyelesaikan visi dan dampak bersama tolok ukur Membangun sistem yang saling	<ul style="list-style-type: none">- Konsensus digunakan dalam membuat keputusan bersama.- Peran, waktu dan evaluasi diformalkan.	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat Kepemimpinan tinggi, tingkat kepercayaan tinggi, produktivitas tinggi- Ide dan keputusan dibagi secara merata

- 
- * Dasar interaksi adalah komitmen diri secara sukarela oleh setiap organisasi, hasilnya adalah serangkaian proses yang sangat kompleks yang **membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang berbeda, dan dukungan yang signifikan.**

KEUNTUNGAN & BIAYA KOLABORASI

- **Alasan Individu dan organisasi berkolaborasi** : ada hal yang hanya dapat mereka capai jika bekerja sama.
- Politisi dan manajer publik : menawarkan biaya yang lebih rendah dan dampak yang lebih besar dalam skala ekonomi
- Kolaborasi dapat mempercepat adopsi teknologi baru, karena institusi dapat dengan cepat belajar dari pengalaman orang lain.
- Kolaborasi memungkinkan organisasi dengan kekuatan yang sangat berbeda, saling melengkapi untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh salah satu organisasi, melalui penerapan gabungan sumber daya.
- Kegagalan berkolaborasi secara efektif berarti kehilangan peluang dengan biaya yang sangat tinggi bagi organisasi.



Terima kasih